

SOSIALISASI PEMECAHAN MASALAH KORUPSI SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI METODE PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DI SD SWASTA PAB 34 PATUMBAK

Ulian Barus¹, Yugi Diraga Prawiyata^{2*}

¹Program Studi PPKn, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

²Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

*Korespondensi: yugidiraga@umnaw.ac.id

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah (1) melatih guru dalam menambah wawasan tentang tindak pidana korupsi di sekolah, (2) melatih dan membimbing guru menggunakan pembelajaran berbasis masalah sebagai metode pembelajaran yang tepat. Sasaran keluaran dari kegiatan ini adalah guru dapat menerapkan sendiri pembelajaran berbasis masalah sehingga proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan mudah dipahami siswa. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini meliputi empat tahap, yaitu: (1) pendahuluan, (2) sosialisasi, (3) pelatihan dan (4) penyebaran kuisioner. Peserta pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru-guru bidang studi PKn di SD PAB 34 Patumbak Deli Serdang. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas peserta, diketahui bahwa semua peserta mengikuti pelatihan dengan baik. Kemudian, berdasarkan hasil kuisioner, seluruh peserta memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatan ini. Melalui sosialisasi dan pelatihan pemecahan masalah korupsi sebagai pencegahan tindak pidana melalui metode pembelajaran berbasis masalah akhirnya kembali memotivasi guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Kata kunci: pembelajaran berbasis masalah, masalah korupsi, tindak pidana

Abstract

The purpose of implementing this community service is to (1) train teachers in adding insight into corruption crimes in schools, (2) train and guide teachers to use problem-based learning as an appropriate learning method. The output target of this activity is that teachers can apply their own problem-based learning so that the teaching and learning process becomes fun and easy for students to understand. The method of implementing this activity includes four stages, namely: (1) introduction, (2) socialization, (3) training and (4) questionnaire distribution. The participants of this community service are teachers who teach Civics at SD PAB 34 Patumbak Deli Serdang. Based on observations of participant activities, it is known that all participants attended the training well. Then, based on the results of the questionnaire, all participants gave a very positive response to this activity. Through socialization and training on solving corruption problems as corruption prevention through problem-based learning methods, it finally motivates teachers to apply various creative and innovative learning methods.

Keywords: problem-based learning, corruption problems, criminal acts

1. PENDAHULUAN

SD Swasta PAB 34 berlokasi di Jalan Pertahanan Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. SD Swasta PAB 34 Patumbak berjarak tempuh 35 km ke Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah. Diperoleh

informasi langsung dari wawancara dengan beberapa guru dan kepala SD Swasta PAB 34 Patumbak bahwa sekolah tersebut memiliki 12 guru, 6 ruang kelas, dan 2 perpustakaan, tetapi tidak terdapat laboratorium. SD Swasta PAB 34 Patumbak Medan menganut Kurikulum K.13. Proses kegiatan belajar

mengajar dilaksanakan di pagi hari mulai pukul 07.15 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB. SD Swasta PAB 34 Patumbak memiliki jumlah siswa 381 orang. Sebagian besar penduduk masih memiliki standar ekonomi yang rendah dan masih banyak orang tua yang berprofesi sebagai tukang becak dan pedagang kecil di sekitar Jalan Bela Patumbak.

Strategi anti korupsi merupakan hal penting dalam membangun keberhasilan suatu lembaga kependidikan (Wirabhakti, 2020). Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (Djalali, 2008). Korupsi sudah ada di Indonesia sejak beberapa waktu lalu dan memiliki pola persebaran yang cukup merata. Padahal, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Pejabat tersebut berasal dari berbagai departemen, mulai dari DPR RI, pejabat pemerintah tingkat pusat hingga perangkat desa. Ini juga mencakup lembaga swasta dan anggota masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi.

Sayangnya, SD Swasta PAB 34 Patumbak memiliki beberapa kendala, terutama guru yang belum begitu paham dalam mengembangkan metode pembelajaran pemberantasan korupsi. Ini disebabkan mereka tidak mengerti bagaimana memberantas korupsi dengan tepat. Sikap guru yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari belum mengakui betapa tidak terpujinya korupsi. Hal ini juga belum terealisasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran atau mata pelajaran yang bersifat umum dan dasar. Pendidikan kewarganegaraan secara konsisten menjunjung dan

mengembangkan cita-cita pendidikan, moralitas bangsa, dan demokrasi, serta mengemban misi mendidik warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia yang membangun karakter bangsa (Azmi, 2016). Hal ini tidak lepas dari keterlibatan kepribadian setiap siswa. Keberhasilan pengembangan karakter tergantung pada orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah yang dapat menciptakan sinergi (Prawiyata, 2017).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah disiplin akademik yang merupakan sistem nilai yang bertujuan untuk membentuk pemahaman dan karakter bangsa pada diri peserta didik dan menjadikannya warga negara yang baik. Mereka akan menjalankan hak dan kewajiban kami dengan benar (Kaelan & Zubaidi, 2010).

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam penjelasan Pasal 37 ayat 1, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menjadikan seseorang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, bahwa siswa harus dididik. (Paturahman, 2017).

Siswa diharapkan menjadi warga negara yang baik dan mengembangkan rasa patriotisme yang kuat setelah menyelesaikan pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, misi pendidikan kewarganegaraan adalah memenuhi misi pendidikan moral bangsa, senantiasa menjunjung tinggi dan mengembangkan cita-cita demokrasi, serta membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia yang membangun karakter bangsa. Visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan individu agar menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia.

Kemudian, jika guru sebagai pusat pembelajaran, maka siswa bisa pasif karena hanya menerima materi. Siswa cenderung menghafal rumus tanpa mengetahui konsep materi. Untuk meningkatkan kesadaran akan sifat buruk korupsi, guru dapat menggunakannya melalui metode pembelajaran berbasis masalah dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran berbasis masalah adalah cara belajar dengan menggambarkan masalah, memotivasi belajar, dan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya melalui proses berpikir masalah (Zenius, 2022). Pembelajaran berbasis masalah merupakan metode yang dikembangkan dari teori belajar konstruktivis Piaget dan Vygotsky. Konstruktivisme menekankan pengetahuan sebagai hasil konstruksi manusia lewat interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan (Trianto, 2007).

Pembelajaran ini membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa (Sani, 2014). Konsisten dengan keyakinan bahwa pembelajaran berbasis masalah mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah dunia nyata dengan cara yang terstruktur untuk membangun pengetahuan, pembelajaran berbasis masalah mengembangkan keterampilan penalaran tingkat tinggi (Daryanto, 2014).

Ini adalah model pembelajaran yang dirancang untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dasar dengan keterampilan memecahkan masalah dan memiliki model pembelajaran yang unik dan kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim.

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan sistematis untuk

memecahkan masalah dan menghadapi tantangan di kemudian hari. Dengan kata lain, masalah yang ada menyebabkan keinginan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk memperoleh pengetahuan baru. Dengan demikian, tujuan kegiatan ini dengan mengintegrasikan nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah dapat tercapai.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan dan sosialisasi yang terdiri dari beberapa tahap.

Pertama, Pendahuluan. Pada tahap ini tim pengabdian menyiapkan surat persetujuan melakukan kegiatan ke sekolah, persyaratan administrasi, dan menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan. Kemudian, tim juga menyiapkan materi dan mengkoordinasikan pembagian tugas dengan semua anggota.

Kedua, Sosialisasi. Tim pengabdian melakukan survey ke sekolah mitra yang beralamat di Jalan Pertahanan Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan mewawancarai kepala sekolah, dan perwakilan guru sehingga diperoleh beberapa masalah mitra yang sangat krusial; guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan materi pembelajaran pemecahan masalah korupsi, ketidakcukupan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi. Kemudian, tim pengabdian menawarkan solusi pelatihan melalui penerapan metode pembelajaran berbasis masalah.

Ketiga, Pelatihan. Dalam tahap ini digunakan metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah dipilih untuk

menunjukkan kepada guru di SD PAB 34 Patumbak bagaimana mengembangkan materi pembelajaran pemecahan masalah korupsi melalui metode pembelajaran berbasis masalah selama proses pembelajaran PPKn. Sementara itu, metode tanya jawab dirasa sangat penting bagi peserta pelatihan ketika mereka diinstruksikan bagaimana menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Hal ini memungkinkan guru untuk memahami dan mempertimbangkan informasi sebanyak mungkin untuk memberantas korupsi selama pembelajaran berlangsung.

Keempat, Evaluasi. Pada tahap ini, tim pengabdian mendistribusikan angket kepada guru untuk meninjau persepsi mereka terhadap kegiatan sosialisasi pemecahan masalah korupsi sebagai pencegahan tindak pidana korupsi melalui metode pembelajaran berbasis masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

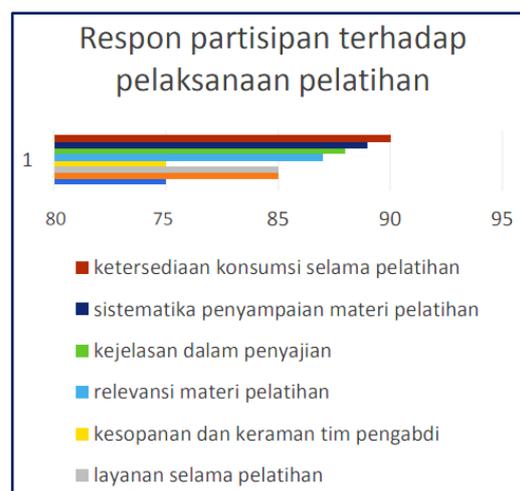
Berdasarkan hasil observasi selama melakukan pengabdian, guru-guru PKN di SD PAB 34 Patumbak hadir sebagai peserta. Mereka menunjukkan antusiasme, dan berpartisipasi secara aktif mengikuti materi yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari hasil observasi yang mencakup empat indikator keterlibatan peserta selama mengikuti pengabdian, yaitu;

1. Aktifitas visual, para peserta memperhatikan dengan baik saat pembicara memberikan penjelasan dan juga menyimak peserta lain yang bertanya atau menjawab pertanyaan.
2. Aktifitas lisan, para peserta cukup baik menjawab pertanyaan yang diajukan dan secara sukarela memberikan saran dan masukan selama proses pelatihan. Dalam hal

ini mereka juga aktif berdiskusi dengan tim pengabdian dan peserta lainnya.

3. Aktifitas menulis, para peserta terlihat sesekali mencatat informasi yang mereka anggap penting dalam *notes* mereka.
4. Aktifitas emosional, terlihat dari antusiasme peserta mengikuti kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir.

Selain itu, tanggapan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi; penyajian materi oleh tim pengabdian, memberikan kesempatan dalam bertanya, layanan selama pelatihan, kesopanan dan keramahan tim pengabdian, relevansi materi pelatihan. kejelasan dalam penyajian, sistematika penyampaian materi pelatihan, ketersediaan konsumsi selama pelatihan terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Hasil kuisioner tanggapan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan

4. KESIMPULAN

Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pendidikan yang memungkinkan siswa untuk belajar sambil secara aktif bekerja pada masalah terbuka tertentu. Siswa diberi kesempatan untuk memecahkan masalah

dalam pengaturan kolaboratif. Tidak seperti pembelajaran tradisional, yang berpusat pada guru dan berfokus pada menghafal, pembelajaran berbasis masalah berpusat pada siswa. Dalam metode ini, siswa terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah dan mengembangkan kebiasaan belajar mandiri melalui latihan dan refleksi. Oleh karena itu, pembelajaran pemecahan masalah korupsi melalui metode pembelajaran berbasis masalah dapat menjadi metode yang sangat efektif untuk diaplikasikan kepada para guru PKn.

REFERENSI

- Azmi, S. (2016). Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 18(1), 77-86.
- Daryanto. (2014). *Pendekatan pembelajaran saintifik kurikulum 2013*. Yogyakarta: Gava Media.
- Djalali, M. A. (2008). Upaya mencegah perilaku korupsi melalui pendidikan. *Tadris Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 85-92.
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Paturahman, M. (2017). Reaktualisasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi (Suatu tinjauan andragogi). *SOSIO-E-KONS*, 9(3), 250-256.
- Prawiyata, Y. D. (2017). Penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa inggris di SDN 106160 desa tanjung rejo kecamatan percut sei tuan. *Amaliah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 14-20.
- Sani, R. A. (2014). *Pembelajaran saintifik untuk implementasi kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Trianto. (2007). *Model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wirabhakti, A. (2020). Integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 173-182.
- Zenius. (2022). *Problem based learning, belajar melalui masalah*. Retrieved from Zenius: <https://www.zenius.net/blog/problem-based-learning>